BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kebersihan lingkungan adalah persoalan jangka panjang yang membutuhkan usaha terus-menerus dan tidak boleh ditunda atau diabaikan. Jika penanganannya terlambat, upaya mengatasinya akan semakin sulit. Di Indonesia, masalah ini sering dianggap remeh oleh masyarakat. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun, kebutuhan barang rumah tangga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan sampah menumpuk dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

Sampah adalah masalah lingkungan yang sulit diatasi dan sering menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Masih banyak sampah berserakan di jalan-jalan. Bahkan, sungai-sungai pun tercemar akibat sampah yang dibuang sembarangan. Hal ini membuat sampah menjadi masalah krusial yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun, hingga saat ini pengelolaan sampah belum dilakukan secara optimal terutama di kota-kota besar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan merusak keindahan lingkungan. Pencemaran air dan udara, serta berkembangnya penyakit akibat tumpukan sampah membuat permukiman di sekitarnya menjadi tidak layak huni.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa

aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat. Sampah bisa berupa zat organik (seperti sisa makanan) atau anorganik (seperti plastik), ada yang bisa terurai dan ada yang tidak. Sampah dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan.

Sampah dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah terurai secara alami melalui proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Jenis sampah ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk atau biogas, serta tergolong tidak berbahaya. Namun, jika dibiarkan menumpuk, sampah organik dapat menimbulkan masalah seperti bau yang menyengat dan menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak teratur (Kusumaningsari dalam (Marlina et al., 2023). Sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit terurai secara alami dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk terdegradasi. Karena sifatnya tersebut, pengelolaan sampah anorganik umumnya dilakukan melalui proses daur ulang guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Marlina et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengubah cara pandang dalam pengelolaan sampah. Undang-undang ini menekankan pendekatan baru dalam mengelola sampah perkotaan melalui program *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Tujuannya adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan mengelolah sampah sejak dari sumbernya hingga ke tempat pembuangan akhir. Aturan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang khusus mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya (misalnya sampah dari kantor atau pasar).

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia mencapai 31.695.556,30 ton/tahun, setara dengan sekitar 99,98% dari total sampah yang dihitung. Jumlah ini menunjukkan betapa besar volume sampah yang harus dikelola setiap tahunnya. Saat ini, teknik pengelolaan sampah di kota-kota Indonesia masih menggunakan cara tradisional, yaitu *Open Dumping* (Tumpukan Terbuka) dimana sampah dibiarkan menumpuk begitu saja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa penanganan khusus dan *Sanitary Landfill* (Timbunan Terkontrol) sampah yang dibawa ke TPA ditumpuk terlebih dahulu, lalu ditimbun dengan lapisan tanah untuk mengurangi dampak bau dan pencemaran. Kedua metode ini memiliki kelemahan, seperti risiko pencemaran udara, air, dan tanah, serta menjadi sarang penyakit karena sampah tidak diolah secara optimal sebelum dibuang. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyoroti berbagai kendala dalam pengelolaan sampah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Penelitian (Wachid & Laksamana Caesar, 2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus terkendala oleh keterbatasan anggaran dan peralatan pengolah sampah. Penelitian lainnya dilakukan

oleh (Sahupala, 2020) yang berjudul implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menemukan bahwa pengelolaan sampah sudah dijalankan melalui sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait seperti SATPOL PP dalam penegakan aturan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mokodompis et al., 2019) yang berjudul implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado menemukan bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, kurangnya fasilitas seperti bank sampah dan TPS, serta lemahnya penegakan hukum terkait pengelolaan sampah. Selain itu, keterbatasan armada pengangkut sampah juga menjadi tantangan dalam operasional pengelolaan sampah di Kota Manado.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Latundo et al., 2023) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Watuawu Kecamatan Lage Kabupaten Poso, menemukan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Watuawu belum optimal akibat kurangnya sosialisasi, minimnya sarana prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif serta koordinasi yang lemah antara pemerintah dan warga turut menjadi hambatan

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi banyak tantangan. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pengolahan sampah, serta minimnya armada pengangkut sampah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah dengan benar juga menjadi hambatan besar. Meskipun ada upaya sosialisasi dan koordinasi antar instansi, pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa daerah juga mengalami masalah lemahnya penegakan aturan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan sosialisasi, penyediaan sarana yang memadai, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan sampah bisa berjalan lebih efektif.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu masalah serius yang muncul adalah peningkatan volume sampah harian. Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi hal ini sebelum menimbulkan masalah baru, seperti penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa ada solusi lebih lanjut. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat memperburuk lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Estimasi jumlah sampah yang dihasilkan saat ini maupun di masa depan menjadi dasar penting dalam merencanakan, merancang, dan

mengevaluasi sistem pengelolaan sampah. Satuan estimasi ini umumnya diukur per orang atau per bangunan, misalnya dalam bentuk berat (kg/orang/hari) atau volume. Pengelolaan sampah mencakup pengaturan seluruh proses mulai dari pembuatan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Sistem ini harus mematuhi prinsip penampungan sampah yang baik, pengumpulan terorganisir, dan penggunaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Jika salah satu tahap ini tidak berjalan lancar (misalnya pengangkutan terhambat atau TPS tidak dikelola), dampak buruk seperti masalah kesehatan, banjir, pencemaran air/tanah, dan kerusakan lingkungan akan muncul.

Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya dialami oleh kota-kota besar, tetapi juga terjadi di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki alam yang indah dengan pegunungan yang hijau serta perkebunan yang subur. Daerah ini memiliki banyak potensi terutama di bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), kabupaten Enrekang memiliki jumlah penduduk sekitar 231, 303 ribu jiwa dengan luas wilayah mencapai 1.821,53 km². Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Bungin, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan

Masalle, dan Kecamatan Baroko. Setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal produksi sampah, yang dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk dan tingkat kegiatan ekonomi. Meskipun wilayah Kabupaten Enrekang tergolong luas, daerah ini menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah. Tantangan tersebut semakin diperburuk dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan peningkatan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk dan sumber sampah (dalam ton/tahun) dari beberapa kecamatan di Kabupaten Enrekang. Data ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai volume sampah yang dihasilkan, yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Sumber Sampah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Sumber Sampah (Ton/Tahun)
1	Maiwa	28,523	5,205
2	Enrekang	37,139	6,778
3	Baraka	24,170	4,411
4	Anggeraja	29,498	5,383
5	Alla	25,088	4,579
6	Bungin	5,690	1.038
7	Cendana	10,084	1,840
8	Curio	18,468	3,370
9	Malua	9,443	1,723
10	Buntu Batu	15,980	2,916
11	Masalle	15,079	2,752
12	Baroko	12,141	2,216
	Jumlah	**231,303**	**42,213**

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang, 2023

Merujuk pada tabel satu, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak sampah. Hal ini menuntut adanya perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal hal tersebut justru menimbulkan kerugian. Lingkungan yang kotor menjadi sumber penyakit dan mencemari udara. Sampah yang menumpuk lama akan membusuk menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kenyamanan warga sekitar Hal tersebut terbukti dengan masih adanya pembuangan sampah di beberapa tempat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah tersebut. Namun, jauhnya lokasi TPA dan terbatasnya bak penampungan sementara menyebabkan sampah menumpuk di berbagai titik.

Gambar 1
Timbulan Sampah Sembarangan di Kawasan Pemukiman



Sumber: Peneliti, 2025

Merujuk pada gambar satu menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang dipenuhi oleh tumpukan sampah di pinggir jalan dan di sekitar pemukiman. Sampah yang terlihat terdiri dari berbagai jenis, seperti plastik, kain, kardus, dan sampah rumah tangga lainnya. Sampah yang menumpuk di tempat terbuka seperti ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Bau menyengat yang dihasilkan dari sampah yang membusuk dapat mencemari udara dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Sampah yang tidak segera dibersihkan dapat menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus, dan berbagai jenis serangga yang dapat menyebarkan penyakit.

Selain itu, pada saat hujan turun air yang menggenangi tumpukan sampah bisa menjadi sarang nyamuk dan meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah. Tidak hanya itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik juga bisa mencemari tanah dan air. Plastik dan bahan non-organik lainnya dapat mencemari tanah dalam jangka panjang, menghambat pertumbuhan tanaman, serta mencemari sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Apabila sampah ini terbawa oleh air hujan ke sungai atau selokan, maka dapat menyebabkan penyumbatan saluran air yang berujung pada banjir.

Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh pemerintah. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum memadai. Terkait dengan hal ini, maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pelaksana yang diberi kewenangan

untuk memberi pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Enrekang. Dengan demikian maka diharapkan untuk mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian tanggal 3 Maret 2025 yang dilakukan peneliti bersama kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mengatakan bahwa:

> Sebenarnya permasalahan utamanya itu kurangnya armada angkutan sampah yang memadai dan hanya ada tiga belas unit armada yaitu Dump Truck sepuluh unit dan Arm Roll tiga unit. Itupun tersedia di lima dari dua belas kecamatan di Kab. Enrekang yang berada di daerah dataran redah yaitu Kecamatan Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Baraka dan Alla. Selebihnya itu tidak ada armada pengangkutan sampahnya karena daerah tersebut merupakan daerah dataran tinggi jadi susah untuk akses jalanan daerah tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jauh, ketersediaan tempat sampah terbatas, minimnya edukasi tentang pengelolaan sampah oleh masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan juga belum ada aturan yang memuat sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Enrekang masih belum optimal karena berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. Saat ini, hanya tersedia tiga belas unit armada yang terdiri dari sepuluh unit dump truck dan tiga unit arm roll. Armada tersebut hanya dapat melayani lima kecamatan di daerah dataran rendah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Armada Pengangkutan Sampah per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Armada Pengangkutan Sampah
1	Baraka	1 Unit
2	Anggeraja	2 Unit
3	Alla	4 Unit
4	Maiwa	1 Unit
5	Enrekang	5 Unit
	Jumlah	**13 Unit**

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang

Sementara itu, tujuh kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Bungin, Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan Malua, belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi, sehingga akses jalan menuju wilayah tersebut sulit dilalui oleh armada pengangkut. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut masih mengandalkan metode penimbunan sampah secara mandiri. Permasalahan selanjutnya lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jauh, ketersediaan tempat sampah terbatas dan minimnya edukasi tentang pengelolaan sampah oleh masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, belum adanya peraturan yang memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan membuat kebiasaan tersebut masih sering terjadi.

Adapun hasil wawancara bersama masyarakat yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 Maret 2025 bersama dengan masyarakat mengatakan bahwa:

> Untuk pengangkutan sampah itu hanya dilakukan dalam satu pecan dek, jadi akibatnya sampah yang sudah menumpuk disepanjang jalan sangat berbau saat kita melintas. Kemudian, ketersediaan tempat sampah yang terbatas sehingga sampah dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan dan bisa dibilang sebagai tempat pembuangan sampah ilegal

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), yang bertujuan mengurangi jumlah sampah serta dampaknya terhadap lingkungan. Banyak warga belum terbiasa memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sampah yang seharusnya bisa di daur ulang justru bercampur dengan sampah lainnya dan berakhir di tempat pembuangan. Selain itu, frekuensi pengangkutan sampah yang hanya dilakukan sekali dalam sepekan menjadi kendala besar. Akibatnya, sampah menumpuk di berbagai lokasi, menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti penyebaran penyakit akibat sampah yang membusuk dan menarik hama.

Selain itu, keterbatasan tempat sampah di area permukiman dan fasilitas umum membuat masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan. Akibatnya, banyak lokasi yang akhirnya berubah menjadi tempat pembuangan sampah ilegal, yang mencemari lingkungan dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Buruknya sistem pengelolaan sampah ini memerlukan solusi yang lebih efektif, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat, penambahan fasilitas, maupun perbaikan sistem pengangkutan sampah agar permasalahan ini tidak semakin memburuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang”.**

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang belum optimal akibat terbatasnya armada pengangkutan sampah, minimnya fasilitas seperti TPS, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Saat ini, hanya lima kecamatan yang mendapatkan layanan pengangkutan sampah, sementara tujuh kecamatan lainnya belum terjangkau. Jarak yang jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pengangkutan yang jarang menyebabkan penumpukan sampah, mencemari lingkungan, dan berisiko bagi kesehatan. Selain itu, kurangnya penerapan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) semakin memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang ?.”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Kabupaten Enrekang. Penelitian ini mampu mendapatkan penyelesaian masalah terkait Implementasi kebijakan pengelolaan

sampah di Kabupaten Enrekang. Adapun manfaat lain yang mampu dihasilkan sebagai berikut:

1. Secara Akademik

   Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti yang akan mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang di masa depan. Implementasi kebijakan sangat penting karena, sebaik apapun kebijakan yang dibuat, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka tujuannya tidak akan tercapai.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Kabupaten Enrekang sehingga dapat membantu meningkatkan layanan kebersihan di masa depan. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan yang belum berjalan dengan baik, serta merancang program pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mendorong masyarakat agar lebih peduli serta ikut terlibat dalam upaya pengelolaan sampah. Jika kebijakan dan peran masyarakat berjalan seimbang, maka lingkungan akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk semua.